

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca-Reformasi, dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan membudaya. Bahkan, kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah dan wajar”. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang apabila tidak dilakukan, akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada Sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum dalam menumpas koruptor di Negeri ini.¹

Kejahatan korupsi saat ini sudah tidak tergolong lagi dalam kejahatan biasa, namun telah menjadi kejahatan yang luar biasa, bahkan dapat juga disamakan dengan kejahatan terhadap kesejahteraan Negara. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan Bangsa dan Negara dapat ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat akibat daripada tindakan korupsi.² Hal ini kemudian berimplikasi

¹ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung. Pustaka Setia. Hal. 193

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terhadap terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan fasilitas umum dari yang seharusnya disediakan oleh Negara.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara, sehingga memerlukan penanganan-penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.³

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Mustahil mereformasi suatu Negara jika korupsi masih merajalela. Sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela. Sebab, korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*).⁴ Korupsi telah menghancurkan tatanan sosial masyarakat dan menghambat pembangunan nasional suatu bangsa, bahkan akibat dari korupsi telah menyebabkan terjadinya krisis moralitas bangsa, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin-pemimpin mereka, hal ini tentu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan peradaban suatu bangsa ketika pemimpin dan masyarakat sudah tidak lagi saling mempercayai, maka

³ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 156

⁴ *Ibid.* Hal. 175

bukanlah peradaban semakin maju, namun justru semakin mundur dan terbelakang.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Sebab, Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut, tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.⁵

Dalam sebuah makalah yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Korupsi* (Muladi 2005), Professor Muladi mengatakan, tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif, yaitu sebagai perbuatan seseorang atau korporasi, baik “*by need*” maupun “*by greed*” untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan Negara. Akan tetapi tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemic, dan “*flagrant*” karena cenderung berdampak sangat luas, yaitu merendahkan martabat bangsa di forum internasional, menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*, merugikan

⁵ *Ibid.* Hal. 176

keuangan Negara dalam jumlah yang signifikan, merusak moral bangsa, mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi), mengganggu stabilitas dan keamanan Negara, mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan, menodai supremasi hukum, melanggar HAM karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil dan dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat Negara dalam keadaan krisis dan bencana alam.

Perbuatan korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang, seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya . Ironisnya, jika dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang, baik pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa, bisa melakukan korupsi. Hal ini karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang Orde Baru sehingga berlomba-lomba untuk “meniru” perilaku korup yang dilakukan oleh orang-orang Orde Baru.⁶ Alasan lain yang hampir sama, dikemukakan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil bukanlah sesuatu hal yang otonom, melainkan ada disposisi antara actor dan kekerasan. Artinya antara penguasan dan pelaku kekerasan ada timbal balik, contohnya kasus korupsi. Sehingga terdapat sejenis perpindahan kekerasan dari Negara kepada masyarakat. Prilaku korupsi yang

⁶ Muhammad Yamin, *Op.cit*, Hal. 224

dilakukan oleh hanya segelintir pejabat Negara akhirnya “berpindah” dilakukan oleh masyarakat biasa.⁷

Lebih berbahaya lagi, apabila korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan oleh seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD atau dilakukan secara berjamaah. Hal yang berbahaya lagi adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah memengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irasional untuk dilakukan.⁸ Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, tidak ada upaya lain yang harus dilakukan, kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energy bangsa ini untuk bersama-sama memberantas penyakit yang sudah kronis ini. Sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak pidana korupsi.⁹

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

⁷ Rieke Diah Pitaloka, *Banalitas Kejahatan : Aku Yang Tak Mengenali Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara*, (Tesis , UI Jakarta, 2004).

⁸ Khoirudin Bashori, “Sambutan”, dalam “*Membangun Gerakan AntiKorupsi dalam Perspektif Pendidikan*”, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004. II-VII.

⁹ Muhammad Yamin, *Op.cit*, Hal. 225

Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, bahkan dapat dikenakan pidana mati bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.¹⁰ Namun upaya hukum yang telah dilakukan selama ini tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih belum mampu memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia (TII) di tahun 2017, skor IPK Indonesia berada pada angka 37 dan menempati posisi 96 dari 180 Negara yang disurvei. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka skor 37 tersebut masih stagnan dan tidak mengalami peningkatan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi di Indonesia masih mengalami hambatan dan tantangan dalam pemberantasannya, diperlukan upaya yang lebih ekstra untuk membasmi korupsi, setidaknya-tidaknya kerugian keuangan Negara dapat dikembalikan.

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan restorative. Tindakan preventif adalah terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sasaran agar masyarakat dapat dicegah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, tindakan represif adalah penindakan terhadap pelaku berdasarkan sanksi yang berlaku, dan tindakan restorative

¹⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Kristian Erdianto. 2019. *Skor IPK Tak Meningkat Agenda Pemberantasan Korupsi dinilai Stagnan*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019

yang salah satunya adalah pengembalian aset Negara dari pelaku tindak pidana korupsi yaitu melalui tindakan hukum pidana maupun melalui gugatan perdata.¹²

Hambatan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya pengembalian aset Negara yang sudah dikuasai oleh koruptor, bahkan dengan mudahnya aset tersebut dapat dialihkan ke pihak lain atau dilarikan ke luar negeri, sehingga tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Di dalam regulasi yang ada saat ini pun belum ada keharusan bahwa aset hasil korupsi harus dikembalikan, melainkan pengembalian aset hanya diakomodir melalui sanksi subsider kepada terpidana korupsi setelah adanya putusan, itu pun sangat sulit direalisasikan karena koruptor justru akan memilih pidana kurungan. Kalau pun terdapat aset yang disita, maka aset tersebut harus ada kaitannya dengan tindak pidana untuk keperluan pembuktian dan harus menunggu putusan hakim baru kemudian dapat dirampas untuk Negara. Namun aset-aset lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi padahal patut diduga telah terdapat kerugian Negara, tetap tidak dapat disita karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Hal tersebut tentu akan memudahkan koruptor untuk segera mengalihkan ataupun menyembunyikan hartanya sampai tidak bisa dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Di dalam teori pengembalian kerugian keuangan Negara dijelaskan bahwa sistem hukum pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan

¹² Aliyth Prakasa dan Rena Yulia, “*Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017, Hal. 37

prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “*berikan kepada Negara yang menjadi hak Negara*”. Di dalam hak Negara terkandung kewajiban Negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “*berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat*”.¹³ Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa aset atau kerugian keuangan Negara haruslah dikembalikan, karena sejatinya seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Negara merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Proses pengembalian aset berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari ppidanaan, terutama terhadap perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan atau yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan Negara. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui lembaga ppidanaan dalam bentuk pengembalian aset hasil tindak

¹³ M. Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta. Q-Communication. Hal. 38

pidana korupsi.¹⁴ Dengan cara seperti itulah maka kesejahteraan sosial dapat dipulihkan kembali, yang mana hal tersebut merupakan lingkup dari kebijakan hukum pidana yang harus segera diterapkan dalam sistem hukum Indonesia secara efektif dan efisien.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan sosial, seperti yang pernah dikemukakan oleh John Rawls, maka pengembalian aset pada hakikatnya adalah kewajiban moral yang merupakan salah satu kebijakan sosial untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan kesejahteraan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional, mengatasi dan mencegah penderitaan masyarakat akibat kemiskinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, memberikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi apa yang menjadi haknya dan penegakan keadilan bagi masyarakat.¹⁵ Sehingga secara filosofis bahwa pengembalian aset merupakan tanggung jawab Negara secara moral dalam pemenuhan hak-hak dasar warganegara.

Jika ditinjau dari teori pemidanaan, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pendekatan gabungan dari tiga teori, yaitu teori keadilan retributif, teori keadilan restoratif dan teori keadilan utilitarianisme. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Kent Roach, bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari teori keadilan haruslah direkonsiliasikan dengan teori keadilan retributif, karena keadilan restorative merupakan pelengkap yang sangat berguna bagi keadilan retributif. Sehingga jika digabungkan juga

¹⁴ Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung. Penerbit PT Alumni. Hal. 44

¹⁵ *Ibid*. Hal. 67

dengan teori keadilan utilitarianisme, maka hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi itu mengandung unsur-unsur dari ketiga teori keadilan di atas, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan perbaikan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi (mengandung prinsip restorative).¹⁶

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengandung kebaikan. Di dalamnya terkandung nilai moral sebagai reaksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan hilangnya peluang bagi individu dan masyarakat untuk hidup layak dalam mencapai kesejahteraan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pompe bahwa pelaku tindak pidana adalah mahluk bermoral yang memiliki tanggung jawab sosial, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bentuk pemidanaan yang diharapkan dapat menyentuh dan menarik tanggung jawab pelaku.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah diatur mengenai perampasan aset baik melalui mekanisme secara pidana maupun mekanisme secara perdata, akan tetapi ketentuan tersebut masih kurang efektif karena harus bergantung pada proses peradilan yang sangat lama yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, dan aset baru bisa dirampas setelah adanya putusan

¹⁶ *Ibid.* Hal. 91

¹⁷ *Ibid.* Hal. 92

pengadilan dan divonisnya terdakwa. Lamanya proses peradilan tentu akan membuat koruptor lebih leluasa untuk mengalihkan seluruh asetnya agar tidak dapat disita, padahal yang terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah pengembalian asetnya sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan Negara demi stabilitas pembangunan yang berkelanjutan. Sudah saatnya pemberantasan korupsi lebih diutamakan ke prinsip *follow the money* daripada *follow the suspect*.

Pemerintah Indonesia telah ikut secara aktif dalam upaya masyarakat Internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pada tahun 2003, pemerintah telah ikut menandatangani *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, yang memuat serangkaian ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁸ Di dalam konvensi tersebut diatur salah satu terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi, sistem pengembalian aset secara langsung dan tidak langsung serta kerjasama internasional untuk penyitaan.¹⁹ Kemudian pada tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003.

Salah satu pertimbangan Indonesia meratifikasi UNCAC 2003 adalah bahwa Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Op.cit*, Hal. 195

¹⁹ Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal. 181

merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.²⁰

Salah satu ketentuan di dalam UNCAC 2003 adalah terkait dengan pengembalian aset hasil tindak pidana dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau konsep “*pengembalian aset tanpa pemidanaan*” yang ruang lingkupnya tidak hanya nasional, tetapi juga mencakup multinasional dengan kerjasama bilateral maupun multilateral. Hal ini tentunya bertujuan untuk kepentingan pengembalian aset-aset dari hasil korupsi yang telah disembunyikan atau bahkan dilarikan oleh para koruptor ke luar negeri atau ke luar yurisdiksi Indonesia yang dapat dilakukan melalui kerjasama internasional antar negara.

Dengan telah diratifikasinya UNCAC 2003 tersebut, sudah seharusnya pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional tentang pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UNCAC 2003. Karena substansi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan di dalam UNCAC 2003 dan bahkan undang-undang tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Op.cit*, Hal. 196

perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini di Indonesia.²¹ Sehingga pengembalian aset sangatlah sulit karena keterbatasan regulasi dan instrumen dalam penindakannya. Maka dari itu, perlu adanya suatu terobosan yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi baik dalam skala nasional maupun multinasional sebagai landasan hukum dengan menggunakan konsep NCB yang terdapat dalam ketentuan UNCAC 2003 terutama sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan problematika perampasan aset hasil korupsi yang dilakukan selama ini di Indonesia, sehingga penulis dapat mengetahui urgensi penerapan konsep perampasan aset berdasarkan ketentuan dalam UNCAC 2003 untuk kemudian diterapkan dalam sistem hukum Indonesia demi mencapai penegakan hukum yang berkeadilan. Maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul ***“Urgensi Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia”***.

²¹ *Op.cit*, Hal. 197

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi pengaturan *non-conviction based Asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pengaturan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep ideal *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis terkait pengembalian aset hasil korupsi dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, manfaat

penelitian ini secara subyektif adalah sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi kepada mahasiswa mengenai pengembalian aset hasil korupsi dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam hukum positif Indonesia.

c. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam membentuk sekaligus memperbaharui regulasi mengenai pemberantasan korupsi khususnya mengenai pengembalian aset hasil korupsi dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* agar pengembalian aset hasil korupsi lebih efektif dan efisien demi penegakan hukum yang berkeadilan.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur untuk menambah pengetahuan mengenai model pengembalian aset hasil korupsi dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam hukum positif Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekurangan dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia saat ini. Selain itu kegunaan penelitian ini untuk memahami bagaimana konsep perampasan aset dengan model *non-conviction based asset forfeiture*. Lebih lanjut kegunaan penelitian

ini adalah untuk menawarkan konsep ideal dalam pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan model tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²² Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara mengidentifikasi asas-asas dan doktrin para ahli untuk kemudian menghasilkan suatu gagasan baru.

2. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau atau merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²³ Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi PBB 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang-

²² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 93

²³ *Ibid*. Hal. 141

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lain yang berkaitan.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu meliputi bahan-bahan yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Google, Youtube dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian berbagai informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁴ Kemudian bahan-bahan yang telah terkumpul disusun dan dikaji untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif isi, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji

²⁴ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hal. 392

konsep *non-conviction based asset forfeiture* secara komprehensif yang kemudian dianalisis untuk menemukan urgensi dari penerapan konsep tersebut, setelah urgensi dari konsep tersebut didapatkan, kemudian akan dirumuskan dan disesuaikan dalam hukum positif Indonesia dalam hal pengembalian aset hasil korupsi. Sehingga penulis akan menemukan urgensi penerapan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif isi akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut akan diolah dan dijelaskan secara deskriptif yang kemudian menghasilkan kesimpulan dan pemecahan masalah terhadap objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika kepenulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat terkait dengan pendahuluan yang antara lain terdiri dari latar belakang permasalahan yang kemudian melatarbelakangi pemilihan topik dalam penelitian ini, kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dibahas mengenai metode penelitian, yang membahas mengenai bagaimana jenis pendekatan masalah yang digunakan,

bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data sistematisa penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori atau konsep-konsep yang bersumber dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka, penulis membuat batasan yang menggunakan beberapa terminologi yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian kepustakaan. Beberapa kajian teori yang penulis gunakan adalah tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, tinjauan umum kerugian keuangan Negara, tinjauan umum mengenai *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), tinjauan penerapan NCB di beberapa Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah sesuai dengan sumber-sumber dan data yang penulis dapatkan selama penelitian. Penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai urgensi pengaturan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia dan konsep ideal *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, Bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan ataupun masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, baik kepada penegak hukum, pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

